

Pengaruh Peran Serta Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan (Studi Kasus di Taman Nasional Bukit Duabelas, Provinsi Jambi)



Oleh:

Waldemar Hasiholan

Widyaiswara Ahli Utama, Pusat Diklat SDM Kementerian Kehutanan,

E-Mail: waldermarhasiholans@gmail.com

ABSTRACT

The conversion of Production Forests, Nature Reserve Forests, and Other Land Uses into Conservation Forests such as National Parks requires significant changes in governance systems. In Bukit Duabelas National Park (TNBD), this transition resulted in resistance from the Orang Rimba community, who rejected boundary demarcation and filed complaints with the National Human Rights Commission regarding alleged abuses by park authorities. As an indigenous group that has long lived and depended on the forest prior to its designation as a national park, the Orang Rimba perceive these changes as a threat to their livelihood and cultural survival. This study aims to analyze: (1) whether the TNBD designation process involved the local community in a participatory manner, (2) whether TNBD management has implemented the seven principles of forest management, and (3) whether the implementation of these principles has improved management effectiveness. A mixed-methods approach was used, combining qualitative methods to explore the root causes of conflict and quantitative assessment using the Management Effectiveness Tracking Tool (WWF, 2007). The findings show that TNBD achieved an effectiveness score of 72.34%, with community participation contributing 41.48% of this performance. These results indicate that community involvement plays a decisive role in improving national park management effectiveness.

Keyword: community participation; national park management; management effectiveness

I. PENDAHULUAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Secara umum tujuan pembangunan suatu taman nasional adalah untuk melindungi proses ekologis yang menunjang kehidupan, mengawetkan keanekaragaman ekosistem, spesies dan genetik yang terdapat di dalam taman nasional serta memanfaatkan potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem yang ada untuk kepentingan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan alam, rekreasi, wisata alam dan jasa lingkungan serta kegiatan penunjang budi daya. Demikian pula dengan penunjukan Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) seluas 60.500 ha di Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 258/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2003. Selain tujuan konservasi sumber daya alam, penetapan Kawasan TNBD juga bertujuan untuk melindungi dan melestarikan ruang hidup dan tempat penghidupan Orang Rimba.

Perubahan Fungsi Hutan Produksi dan Fungsi

Hutan Suaka Alam serta Areal Penggunaan Lain menjadi Kawasan TNBD tentunya juga akan mengubah sistem pengelolaannya, yaitu dari sistem pengelolaan hutan produksi dan sistem pengelolaan hutan suaka alam serta sistem pengelolaan areal penggunaan lain berubah menjadi satu kesatuan sistem pengelolaan taman nasional. Akibatnya telah terjadi penolakan terhadap kehadiran TNBD, penolakan pelaksanaan batas kawasan TNBD oleh Orang Rimba dan pengaduan Orang Rimba kepada Komnas HAM tentang pelanggaran HAM oleh pengelola kawasan TNBD terhadap Orang Rimba. Selain itu Orang Rimba yang telah hidup dan mencari penghidupan di dalam kawasan hutan tersebut jauh sebelum ditunjuk dan ditetapkan sebagai taman nasional merasa terancam kehidupannya. Menurut Hasiholan (2006) ada 7 Prinsip Pengelolaan Hutan yang dapat menjamin kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

1. Pengelolaan hutan haruslah berbasis Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Pengelolaan hutan haruslah berbasis lanskap dan ekosistem;

3. Pengelolaan hutan haruslah berbasis multi fungsi dan multi produk;
4. Pengelolaan hutan haruslah berbasis sosial dan budaya;
5. Pengelolaan hutan haruslah berbasis multi pihak khususnya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan;
6. Pengelolaan hutan haruslah berbasis tapak atau reso base managemen;
7. Pengelolaan hutan haruslah berbasis penegakan hukum.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut di atas, peran masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan TNBD menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan keberadaan masyarakat jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai taman nasional. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan atas perubahan status kawasan dari fungsi produksi, suaka alam, areal penggunaan lain menjadi kawasan taman nasional dan dampak yang ditimbulkannya. Dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan taman nasional yang efektif diperlukan keterlibatan masyarakat secara aktif dan partisipatif dalam pengelolaan taman nasional sehingga kehadiran taman nasional dapat diterima dan didukung oleh masyarakat melalui pengelolaan taman nasional berbasis masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dalam proses penetapan TNBD telah melibatkan masyarakat secara partisipatif?
2. Apakah dalam pengelolaan TNBD sudah menerapkan 7 prinsip pengelolaan hutan?
3. Apakah setelah menerapkan 7 prinsip pengelolaan hutan, menjadikan pengelolaan TNBD efektif?

C. Tujuan Kajian

Secara umum tujuan kajian ini adalah untuk memberikan masukan bagi para pihak dalam

pengelolaan hutan termasuk taman nasional untuk menerapkan 7 Prinsip Pengelolaan Hutan yang di dalamnya termasuk peran serta masyarakat. Sedangkan tujuan khusus dari kajian ini adalah:

1. Mengkaji keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan TNBD.
2. Menganalisis proses pemberdayaan Orang Rimba dalam pengelolaan TNBD Berbasis Masyarakat.
3. Menilai tingkat efektivitas pengelolaan TNBD setelah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan taman nasional.

II. METODE KAJIAN

Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan atas masalah dalam pengelolaan taman nasional tersebut maka dilakukan kajian dengan menggunakan metode gabungan yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui penyebab utama terjadinya penolakan terhadap kehadiran suatu taman nasional dan terjadinya konflik antara pengelola kawasan taman nasional dengan masyarakat.

Data dan informasi hasil pengumpulan data kualitatif untuk mengetahui proses keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif. Sedangkan data dan informasi hasil pengumpulan data kuantitatif dianalisis menggunakan metode *Management Effectiveness Tracking Tool* Perangkat Pemantau Efektifitas Pengelolaan (METT) dikembangkan dan informasikan oleh Sue Stolton, Marck Hockings, Nigel Dudley, Kathy MacKinnon, Tony Whitten dan Fiona Leverington (dalam WWF, 2007).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penetapan TNBD

Merujuk pada pengalaman Penulis dalam

mengelola kawasan konservasi di Provinsi Kalimantan Barat, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Provinsi Lampung dan di Provinsi Riau serta Provinsi Jambi, selalu saja terjadi penolakan terhadap kehadiran suatu kawasan konservasi sehingga tujuan pengelolaan kawasan konservasi menjadi kurang efektif. Dengan mengekstrak unsur-unsur atau kriteria yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia dan peraturan pemerintah terkait sebagai turunannya serta referensi dari ahli di bidang taman nasional yang menerbitkan literatur atau kebijakan tentang taman nasional, seperti Jean Paul Harroy (1971) dan Marion Clawson (1986). Hasilnya menunjukkan bahwa dalam proses penetapan dan pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas ternyata belum menerapkan 7 prinsip pengelolaan hutan secara utuh, diantaranya adalah melibatkan masyarakat secara aktif dan partisipatif. Keadaan seperti inilah yang telah memicu terjadinya konflik antara pengelola kawasan dan masyarakat pada saat awal pengelolaan kawasan. Kesenjangan antara kriteria dan realisasi proses penetapan suatu taman nasional selengkapnya disajikan dalam Tabel 1.

B. Proses Pemberdayaan Orang Rimba dalam Pengelolaan TNBD Berbasis Masyarakat

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya peningkatan peran masyarakat secara partisipatif dalam mengelola kawasan taman nasional. Tindakan awal yang dilakukan adalah membangun kesepakatan antara Pengelola Kawasan dengan Masyarakat, yang antara lain:

1. Sepakat untuk membentuk satuan tugas perencanaan taman nasional yang terdiri atas unsur pengelola kawasan, unsur masyarakat adat dan unsur masyarakat desa di tingkat tapak;
2. Sepakat untuk membentuk satuan tugas zonas taman nasional, yang terdiri atas unsur

Pengelola kawasan, unsur masyarakat adat dan unsur masyarakat desa di tingkat tapak;

3. Sepakat untuk membentuk satuan tugas implementasi dan monitoring program dan pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas unsur pengelola kawasan, unsur masyarakat adat dan unsur masyarakat desa di tingkat tapak.
 - a. Pengelola kawasan dan masyarakat adat sepakat untuk menerapkan hukum adat dan/atau hukum negara dalam penanganan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di kawasan taman nasional.
 - b. Kelembagaan pengelolaan taman nasional berbasis masyarakat di tingkat tapak, terdiri atas: unsur pengelola kawasan, unsur masyarakat adat dan unsur masyarakat desa. Adapun struktur kelembagaan pengelolaan Taman Nasional berbasis masyarakat di tingkat tapak, adalah sebagaimana disajikan dalam gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengelolaan TNBD Berbasis Masyarakat di Tingkat Resort

Untuk menentukan zonasi taman nasional yang dapat diterima oleh masyarakat, perlu dilaksanakan penataan zonasi secara partisipatif, oleh karena itu sebelum melakukan penataan zonasi secara partisipatif kepada seluruh anggota tim kerja zonasi diberikan pelatihan navigasi hutan agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan di Lapangan. Hasil penataan zonasi partisipatif

Tabel 1. Identifikasi Kesenjangan Antara Kriteria dan Realisasi Proses Penetapan Taman Nasional Bukit Duabelas

No	Penetapan Kawasan Hutan/Taman Nasional		Kesenjangan	Akibat Kesenjangan
	Kriteria	Realisasi		
1.	Harus didasari pada hasil inventarisasi sumber daya alam/hutan	Dilakukan dengan penunjukan kawasan hutan atau perubahan fungsi	Terjadinya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan	Terjadi konflik kepentingan penggunaan dan pemanfaatan kawasan
2.	Harus diterima oleh masyarakat	Dalam penunjukan taman nasional belum mendengarkan aspirasi masyarakat yang bermukim di dalam/sekitar kawasan	Terjadinya perbedaan dan kepentingan dalam pemanfaatan atau penggunaan kawasan	Penolakan atau resistensi terhadap keberadaan taman nasional
3.	Masyarakat berhak mengetahui rencana pembangunan kehutanan	Masyarakat belum banyak tahu rencana pembangunan kehutanan di wilayahnya	Terjadinya perbedaan dan kepentingan dalam pemanfaatan atau penggunaan kawasan	Penolakan atau resistensi terhadap keberadaan kawasan hutan
4.	Masyarakat berhak mendapatkan kompensasi atas tertutupnya akses dalam pemanfaatan kawasan hutan	Belum ada mekanisme pemberian kompensasi kepada masyarakat atas hilangnya akses dalam pemanfaatan hutan	Terjadinya ketidakpuasan dan tuntutan untuk tetap mempertahankan kawasan	Penolakan atau resistensi terhadap penetapan kawasan hutan
5.	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan taman nasional menjadi kebutuhan utama	Peranserta masyarakat belum menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan taman nasional.	Terjadinya ketidakpuasan dan kekecewaan dalam pengelolaan taman nasional	Lemahnya dukungan masyarakat dalam pengelolaan taman nasional
6.	Adanya program peningkatan kemampuan SDM masyarakat di dalam/sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan	Program partisipatif masyarakat dalam pengelolaan taman nasional masih terbatas	Terjadinya ketidakpuasan dan kekecewaan dalam pengelolaan hutan/ taman nasional	Lemahnya dukungan masyarakat dalam pengelolaan hutan/taman nasional
7.	Nilai-nilai kearifan tradisional dalam budaya masyarakat dapat dijadikan aturan kesepakatan dalam pengelolaan kawasan	Dalam pengelolaan taman nasional lebih mengutamakan aturan formal atau hukum positif	Terjadinya ketidakpuasan dan kekecewaan dalam pengelolaan hutan/ taman nasional	Lemahnya dukungan masyarakat dalam pengelolaan hutan/ taman nasional
8.	Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksana-an pembangunan kehutanan	Pemerintah jarang melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan secara aktif	Terjadinya inefisiensi dalam pengelolaan hutan/taman nasional	Lemahnya dukungan masyarakat dalam pengelolaan hutan/ taman nasional
9.	Perlindungan dan pengakuan atas keberadaan masyarakat adat.	Belum adanya Peraturan Daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat	Terjadinya inefisiensi dalam pengelolaan hutan/ taman nasional	Lemahnya dukungan masyarakat dalam pengelolaan hutan
10.	Hak atas kepemilikan hutan/ taman nasional	Taman Nasional dikuasai oleh Negara dan belum mengakui kepemilikan masyarakat adat atas kawasan taman nasional	Terjadinya kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan/ taman nasional	Konflik kepentingan
11.	Taman Nasional dikelola dengan dana yang cukup dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah	Unsur-unsur manajemen taman nasional dalam keadaan terbatas dan belum mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun daerah	Manajemen taman nasional menjadi lemah	Program dan kegiatan pengelolaan taman nasional kurang optimal dan kurang mendapat dukungan masyarakat
12.	Penataan Batas Kawasan Hutan di Lapangan melibatkan masyarakat secara aktif	Penataan batas di lapangan belum melibatkan masyarakat secara aktif (formalitas)	Banyak lahan-lahan masyarakat berada di dalam kawasan hutan yang ditatabatas	Batas kawasan hutan tidak mendapat pengakuan masyarakat

memberikan ruang kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat lebih luas dan sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian konflik antara pengelola kawasan dengan masyarakat dapat dihindari. Dinamika perubahan zonasi di Taman Nasional adalah dinamis dan sangat bergantung pada kondisi sosial ekonomi serta budaya masyarakat setempat. Adapun bentuk-bentuk zonasi yang dilaksanakan secara partisipatif adalah:

1. **Zona Inti (ZI):** bagian dari kawasan taman nasional yang sangat sensitif dan sensitif sehingga memerlukan upaya perlindungan secara ketat, terutama untuk perlindungan hidupan liar (tumbuhan dan satwa liar) terpenting/kunci berikut habitatnya dan umumnya berupa habitat/hutan primer. Selain itu area ini merupakan daerah dengan garis kontur yang rapat atau dapat dikategorikan daerah perbukitan yang berfungsi sebagai tangkapan air yang sangat penting keberadaannya sebagai sumber air untuk penghidupan komunitas orang rimba yang tinggal disekitar daerah aliran sungai dalam kawasan taman nasional.
2. **Zona Rimba (ZRI):** bagian dari kawasan taman nasional yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian dengan proses alami tetap menjadi prioritas namun kegiatan manusia dalam batas tertentu masih diperkenankan dan bahkan diperlukan dalam bentuk pembinaan habitat, pembinaan populasi dan kegiatan pariwisata alam terbatas
3. **Zona Pemanfaatan (ZP):** bagian dari kawasan taman nasional yang memiliki potensi fenomena alam yang menarik, secara fisik dan biologi kurang sensitif untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana fisik bagi akomodasi pariwisata alam dan pengelolaan taman nasional. Kemudahan akses dengan perkampungan tempat pemukiman masyarakat (kemudahan penyertaan masyarakat dan keuntungan ekonomi).
4. **Zona Tradisional (ZTr):** bagian dari kawasan taman nasional yang didalamnya dapat

dikembangkan dan dimanfaatkan secara tradisional untuk memenuhi/ mengakomodasi kebutuhan dasar sehari-hari hanya bagi Komunitas Orang Rimba yang masih tinggal di dalam kawasan taman nasional dan masih menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam hutan dengan memegang prinsip kelestarian, serta untuk melindungi zona-zona lain dan mempertahankan hubungan tradisional dengan Komunitas Orang Rimba yang tinggal di luar kawasan taman nasional dan masyarakat/ penduduk sekitar kawasan taman nasional yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan.

5. **Zona Religi (ZBS):** bagian dari kawasan taman nasional yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan/kepercayaan dan aktivitas lain yang disakralkan yang peruntukannya hanya bagi Komunitas Orang Rimba yang masih tinggal di dalam kawasan taman nasional.
6. **Zona Rehabilitasi (ZRe):** bagian dari kawasan taman nasional yang mengalami kerusakan akibat kegiatan manusia atau alam, dan perlu direhabilitasi/dipulihkan kembali dengan mempergunakan jenis-jenis asli setempat (mencakup areal perladangan/bekas perladangan, penambangan batu gunung, pemukiman liar, bencana alam dan sebagainya).
7. **Zona Khusus (ZKh):** bagian dari kawasan taman nasional yang didalamnya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara tradisional dengan memegang prinsip kelestarian untuk memenuhi/ mengakomodasi kebutuhan dasar sehari-hari bagi masyarakat/penduduk sekitar kawasan yang telah menggantungkan penghidupannya pada sumber daya alam hutan secara turun temurun, serta untuk melindungi zona-zona lain dan mempertahankan hubungan tradisional antar masyarakat sekitar kawasan dan juga dengan Komunitas Orang Rimba yang tinggal di dalam maupun di luar kawasan taman nasional yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan taman nasional haruslah secara nyata meliputi:

- 1. Perencanaan:** Kegiatan perencanaan dilakukan secara bersama-sama antara Pengelola Kawasan dengan Masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain: penataan zonasi, penyusunan rencana pengelolaan taman nasional jangka panjang dan jangka pendek.
- 2. Pengorganisasian:** Kegiatan ini mencakup pembentukan kelembagaan pengelola taman nasional berbasis masyarakat di tingkat *resort*, yang antara lain adalah: pembentukan satgas zonasi taman nasional, satgas perencanaan taman nasional, satgas *community patrol*, satgas penyuluhan masyarakat dan satgas tehni kehutanan.
- 3. Pelaksanaan kegiatan:** Kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat adalah kegiatan pengamanan hutan dalam bentuk *community patrol*, kegiatan pengelolaan tumbuhan anggrek, kegiatan pengelolaan tumbuhan obat, kegiatan pengelolaan jasa wisata alam dan kegiatan pemanenan hasil hutan bukan kayu.
- 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi:** Kegiatan

monitoring dan evaluasi pengelolaan taman nasional dilaksanakan secara bersama-sama antara pengelola taman nasional dengan masyarakat. Demikian pula peraturan dan ketentuan yang berlaku di Taman Nasional selain hukum positif juga hukum adat.



Gambar 2. *Community Patrol*

C. Tingkat Efektivitas Pengelolaan TNBD Setelah Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional

Untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan kawasan setelah melibatkan masyarakat secara aktif dan partisipatif dalam pengelolaan Kawasan TNBD, dilakukan dengan menggunakan metode METT sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Penilaian Tingkat Keefektifan Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas Berdasarkan Metode METT

NO	KRITERIA	SKOR	PENJELASAN
A	Elemen Manajemen Yang Kurang Membutuhkan Peran Aktif Masyarakat		
1	Kawasan konservasi tersebut telah memiliki status hukum formal	3	SK Menhutbun Tentang Penunjukan TNBD
2	Terdapat peraturan untuk mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan yang tidak sesuai didalam kawasan konservasi dan memberikan dasar yang sangat baik bagi pengelolaan	3	SK Direktur Jenderral Tentang Zonasi TNBD
3	Pegawai memiliki kapasitas/sumberdaya yang memadai untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasitetapi masih ada kekurangan	2	Telah memiliki tenaga structural, non structural dan fungsional Polhut, PEH dan Penyuluh yang memadai
4	Desain kawasan konservasi membantu pencapaian tujuannya; Desain memadai untuk konservasi spesies dan habitat; dan menjaga proses-proses ekologis seperti aliran permukaan dan bawah tanah pada skala DAS, pola gangguan alam, dll	3	Desai Kawasan Kompak dan mudah diakses untuk pencapaian tujuan pengelolaan
5	Ada cukup survey dan riset tetapi tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	2	Kegiatan survey dan riset terkelola dengn cukup baik
6	Jumlat pegawai sudah mencukupi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	3	Seluruh jabatan fungsional yang dibutuhkan sudah tersedia di Balai TNBD
7	Pelatihan dan keahlian pegawai relatif rendah untuk kebutuhan kawasan konservasi	1	Kesempatan untuk mengikuti pelatihan bagi pegawai sangat terbatas
8	Anggaran yang tersedia mencukupi tetapi perlu ditingkatkan untuk sepenuhnya mencapai pengelolaan yang efektif	2	Anggaran mencukupi

9	Ada cukup kepastian anggaran inti (core budget) untuk kegiatan regular kawasan konservasi tetapi banyak inovasi dan inisiatif yang tergantung pendanaan dari luar	2	Anggaran bersumber dari APBN yang sudah pasti ada setiap tahunnya
10	Pengelolaan anggaran kurang dan mengurangi Efektivitas	1	Anggaran masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan
11	Terdapat beberapa perlengkapan dan fasilitas tetapi tidak memadai untuk sebagian besar kebutuhan pengelolaan	1	Perlengkapan dan fasilitas lapangan masih belum memadai
12	Ada pemeliharaan dasar untuk perlengkapan dan fasilitas	2	Pemeliharaan masih mencukupi untuk fasilitas dan perlengkapan yang ada
13	Lahan dikumpulkan, tetapi tidak ada kontribusi pada kawasan konservasi atau lingkungan sekitarnya	1	Lahan dikumpulkan, tetapi tidak ada kontribusi pada kawasan konservasi atau lingkungan sekitarnya
14	Beberapa nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya sebagian menurun/berkurang tetapi nilai-nilai yang paling penting tidak terkena dampak secara signifikan	2	Beberapa nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya sebagian menurun/berkurang tetapi nilai-nilai yang paling penting tidak terkena dampak secara signifikan
15	Penilaian kondisi nilai-nilai didasarkan pada riset dan/atau monitoring	1	Penilaian kondisi nilai-nilai didasarkan pada riset dan/atau monitoring
Jumlah A		29	
B	Elemen Manajemen Yang Membutuhkan Peran Aktif Masyarakat		
16	kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati dan pengelolaan telah memenuhi semua tujuan tersebut	3	Telah memiliki Visi dan Misi serta Rencana Pengelolaan berdasarkan kesepakatan Para Pihak
17	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan dan penduduk lokal/pengguna lahan yang bertetangga dan ditetapkan.	3	Batas Kawasan TNBT telah Temu Gelang dan Sudah mendapat penetapan Menteri Kehutanan
18	Rencana pengelolaan telah ada dan diimplementasikan seluruhnya	3	Sudah memiliki Rencana Rencana Pengelolaan sudah menjadi dasar pembangunan dan kegiatan di TNBD
19	Terdapat jadwal dan proses review periodik dan updating rencana pengelolaan	1	Sudah ada jadwal review rencana pengelolaan secara periodik dan sudah dilaksanakan
20	Terdapat rencana kerja reguler dan semua kegiatan telah diimplementasikan	3	Rencana Pengelolaan Tahunan sudah menjadi dasar implementasi kegiatan
21	Informasi tentang habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi telah memadai untuk sebagian besar area kunci perencanaan dan pembuatan keputusan	2	Sudah tersedia informasi tentang habitat: spesies, proses ekologis dan budaya Orang Rimba
22	Sistem perlindungan sebagian besar atau seluruhnya efektif dalam mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya	3	Sistem perlindungan dan pengamanan hutan sangat efektif dan melibatkan masyarakat
23	Banyak persyaratan pengelolaan (habitat kritis, spesies, proses-proses ekologis dan nilai-nilai budaya) tengah dilakukan tetapi beberapa isu kunci belum diperhatikan	2	persyaratan pengelolaan (habitat kritis, spesies, proses-proses ekologis dan nilai-nilai budaya) tengah dilakukan tetapi beberapa isu kunci belum diperhatikan
24	Ada program pendidikan dan penyadaran tetapi hanya sebagian memenuhi kebutuhan dan perlu ditingkatkan	2	Ada program pendidikan dan penyadaran tetapi masih kurang
25	Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan tidak memperhatikan kebutuhan kawasan konservasi dan kegiatan/kebijakan yang merugikan kelangsungan kawasan	0	Belum ada kerjasama dalam penggunaan air
26	Perencanaan dan pengelolaan di dalam DAS atau lanskap (bentang alam) lokasi kawasan konservasi memasukkan provisi untuk kondisi lingkungan yang memadai (cth. Volume, kualitas dan waktu aliran air, tingkat polusi air, dll) untuk menjaga habitat yang relevant	1	Ada kegiatan pengelolaan lansekap
27	Ada komunikasi antara pengelola kawasan dengan pihak swasta pengguna lahan dan air di sekitar tetapi hanya sedikit atau tidak ada kerjasama	1	Ada komunikasi antara pengelola kawasan dengan pihak swasta pengguna lahan dan air di sekitar tetapi hanya sedikit atau tidak ada kerjasama
28	Masyarakat asli dan tradisional secara langsung berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan lindung, cth. Co-management	3	Orang Rimba secara langsung berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan lindung.
29	Masyarakat lokal secara langsung berpartisipasi terhadap semua pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan lindung, cth co-manajemen	3	Orang Rimba secara langsung berpartisipasi terhadap semua pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan lindung, cth co-manajemen

30	Masyarakat lokal dan/atau tradisional secara aktif mendukung kawasan konservasi	1	Masyarakat lokal dan/atau tradisional secara aktif mendukung kawasan konservasi
31	Terdapat aliran besar keuntungan ekonomis kepada masyarakat lokal dari kegiatan-kegiatan yang terkait kawasan konservasi	3	Terdapat aliran besar keuntungan ekonomis kepada masyarakat lokal dari kegiatan-kegiatan yang terkait kawasan konservasi
32	Terdapat system monitoring dan evaluasi yang baik, dilaksanakan dengan baik dan digunakan dalam manajemen adaptif	3	Masyarakat terlibat aktif dalam system monitoring dan evaluasi pengelolaan taman nasional
33	Fasilitas dan jasa bagi pengunjung tidak memadai untuk tingkat kunjungan saat ini	1	Fasilitas dan jasa bagi pengunjung tidak memadai untuk tingkat kunjungan saat ini
34	Terdapat hubungan antara pengelola kawasan dengan operator wisata tetapi sangat terbatas pada urusan administrasi atau peraturan	1	Terdapat hubungan antara pengelola kawasan dengan operator wisata tetapi sangat terbatas pada urusan administrasi atau peraturan
	Jumlah B	39	
	TOTAL SCORING IMPLEMENTASI METT	68	
	TOTAL SCORING METT TERBAIK	94	

Dengan menggunakan metode *Management Effectiveness Tracking Tool* (dalam WWF, 2007), penilaian terhadap tingkat efektivitas pengelolaan kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas memperoleh nilai efektivitas sebesar $68/94 = 72.34\%$ yang berarti bahwa kawasan telah dikelola dengan baik. Pengaruh terbesar terhadap efektivitas pengelolaan Kawasan TNBD adalah adanya keterlibatan masyarakat yaitu sebesar $39/94 \times 100\% = 41.48\%$ atau dengan pernyataan lain bahwa efektivitas pengelolaan Kawasan TNBD sangat dipengaruhi oleh peran serta masyarakat yaitu sebesar $41.48/72.34 \times 100\% = 57.34\%$.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Dalam proses penetapan kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas belum melibatkan masyarakat secara partisipatif sehingga pada saat awal dukungan masyarakat terhadap kehadiran taman nasional sangat lemah. Kondisi inilah yang menyebabkan tujuan pengelolaan TNBD kurang efektif.
2. Proses pemberdayaan Orang Rimba dalam pengelolaan TNBD berbasis masyarakat diawali dengan membangun kesepakatan bersama untuk membentuk kelembagaan pengelolaan TNBD berbasis masyarakat di tingkat tapak atau *resort* Pengelolaan Taman Nasional. Ruang lingkup kegiatan pengelolaan TNBD Berbasis Masyarakat ini meliputi penataan zonasi kawasan, perencanaan pengelolaan,

pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi.

3. Pengelolaan TNBD Berbasis Masyarakat yang melibatkan masyarakat secara aktif dan partisipatif telah mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan taman nasional.

B. Kesimpulan

1. Mengingat masih banyak kawasan konservasi dan kawasan hutan yang belum melibatkan masyarakat secara aktif dan partisipatif mulai pada saat proses penetapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan kawasan, maka disarankan untuk setiap kawasan konservasi atau kawasan hutan tersebut disusun suatu rencana pengelolaan kawasan hutan yang melibatkan masyarakat dan para pihak terkait secara aktif dan partisipatif.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Taman Nasional ataupun Kawasan Hutan disarankan pengelolaan kawasan tersebut melibatkan peran serta masyarakat secara aktif.
3. Mengingat dalam pengelolaan taman nasional yang melibatkan masyarakat terdapat unsur pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka diperlukan peraturan khusus terkait administrasi perizinan dan prosedur pemanfaatan sumber daya alam hayati yang cepat dan efisien.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

salah satu referensi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan hutan lainya di Indonesia. 🌿

DAFTAR PUSTAKA

Clawson, M. (1986). *Land use information: A critical analysis of the National Resources Inventory. Washington, DC: Resources for the Future.*

[DEPHUT] Departemen Kehutanan. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta.

[DEPHUT] Departemen Kehutanan. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta.

[DEPHUTBUN] Departemen Kehutanan dan Perkebunan. (2003). Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 258/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2003 tentang penunjukan Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) seluas 60.500 hektar di Provinsi Jambi.

[DEPHUT] Departemen Kehutanan. (2024). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta.

Hasiholan, W. (2006). Pengembangan Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas Berbasis Masyarakat.

Harroy, J.P. (1971). *United Nations List of National Parks and Equivalent Reserves, Volume 15. International Union of Conservation Nature and Natural Resources.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan

Ekosistemnya

[WWF] *World Wildlife Fund International. (2007). Management Effectiveness Tracking Tool. Switzerland.*